

**SATUAN UANG RUPIAH YANG BERLAKU DI DAERAH
TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
(Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1964 Tanggal 27 Juni 1964)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk mencapai satu macam satuan uang Rupiah yang berlaku bagi seluruh wilayah Republik Indonesia menganggap telah tiba waktunya untuk memperlakukan di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau satuan uang Rupiah yang kini berlaku di daerah Republik Indonesia lainnya;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat 1 jo pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Pasal 5 Undang-undang No. 27 tahun 1953;
3. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 8 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953;
4. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1963;

Mendengar :

Presidium Kabinet Kerja, Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan, Menteri Urusan Bank Sentral dan Menteri Urusan Anggaran Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATUAN UANG
RUPIAH YANG BERLAKU DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1964, dinyatakan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk Daerah Tingkat II Kepulauan Riau :

1. uang kertas Bank Indonesia yang kini berlaku di daerah Republik Indonesia di luar daerah Propinsi Irian Barat dan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau;
2. uang kertas Pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan yang kini berlaku di dalam Daerah Republik Indonesia di luar daerah Propinsi Irian Barat dan daerah Tingkat II Kepulauan Riau;

3. uang logam yang dikeluarkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan yang kini berlaku di dalam daerah Republik Indonesia di luar daerah Propinsi Irian Barat dan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Pasal 2

Kecuali untuk transaksi jual-beli valuta asing, satuan-satuan mata-uang Rupiah Kepulauan Riau yang dikeluarkan berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1963 tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah hingga saat penarikannya dari peredaran.

Pasal 3

1. Kepada Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral diberi wewenang untuk menetapkan tanggal penarikan, jangka waktu penukaran dan nilai perbandingan antara satuan mata-uang Rupiah Kepulauan Riau dengan satuan mata-uang Rupiah tersebut pada pasal 1 diatas.
2. Sesudah jangka waktu untuk penukaran yang ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini berakhir, maka hak untuk menuntut penukaran atau penggantian nilainya hapus.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan lain untuk melaksanakan Penetapan Presiden ini serta hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Penetapan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan dan Menteri Urusan Bank Sentral.

Pasal 5

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1964.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 1964.

WAKIL SEKRETARIS NEGARA,

SANTOSO S.H.

LEMBARAN NEGARA NO. 63 TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG